

**BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN
2022**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang atas pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun. LKjIP Tahun 2021 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2021, Perjanjian Kinerja 2021 dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Semoga penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang ini dapat mencerminkan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Malinau, 08 Agustus 2022
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2021. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda dan Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mengelola anggaran sebesar **Rp 13.181.714.335** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 13.144.996.335** dan Belanja Modal sebesar **Rp 36.718.000**. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal digunakan belanja modal peralatan dan mesin serta modal aset tetap lainnya. Realisasi anggaran belanja operasi dan modal sebesar **95,16%** dengan penyerapan dana sebesar **Rp 12.543.463.981**. Dari sisi akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, Bappeda dan Litbang melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar **89,34%**.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan capaian kinerja rata-rata **109,06%**.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan pagu anggaran Bappeda dan Litbang merupakan APBD-P dari proses rasionalisasi anggaran 2021 untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga menyebabkan keterbatasan Bappeda dan Litbang untuk melaksanakan kegiatan yang seharusnya merupakan prioritas.

LKjIP 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Malinau, 8 Agustus 2022
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670217 199312 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
i Ringkasan Eksekutif.....		
ii Daftar Isi		
iv Daftar Tabel.....		
v Daftar Gambar.....		
vii Dokumentasi Kegiatan		
BAB I	PENDAHULUAN	
1		
A.	Maksud dan Tujuan Laporan.....	1
B.	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	6
D.	Isu Strategis	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1	Rencana Strategis Tahun 2016-2021	10
2.2	Tujuan dan Sasaran	11
2.3	Strategi dan Kebijakan	14
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.5	Perjanjian Kinerja	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B.	Analisis Capaian Kinerja	24
C.	Realisasi Anggaran	56
BAB IV	PENUTUP	63



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	13
Tabel 2.3	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	16
Tabel 2.4	Indikator kinerja utama (IKU) Bappeda dan Litbang	19
Tabel 2.5 Perjanjian kinerja tahun 2022	21
Tabel 3.1	Capaian kinerja Bappeda dan Litbang tahun 2021	21
Tabel 3.1.1	Evaluasi pencapaian sasaran 1	24
Tabel 3.1.2	Program dalam RKPD 2021 yang selaras dengan Program RPJMD 2016-2021.....	26
Tabel 3.1.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	28
Tabel 3.1.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah.....	28
Tabel 3.1.5	Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021	30
Tabel 3.2.1	Evaluasi pencapaian sasaran 2	32
Tabel 3.2.2	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan RKPD.....	33
Tabel 3.2.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	35
Tabel 3.2.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah.....	35
Tabel 3.2.5	Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD 2021	36
Tabel 3.2.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	37
Tabel 3.2.7	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah.....	37
Tabel 3.2.8	Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021	39
Tabel 3.3.1	Evaluasi pencapaian sasaran 3	41
Tabel 3.3.2	Capaian kinerja SKPD 2021	42
Tabel 3.3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	44
Tabel 3.3.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah.....	44
Tabel 3.3.5	Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021	46



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.4.1	Evaluasi pencapaian sasaran 4	47
Tabel 3.4.2	Capaian kinerja SKPD 2021	49
Tabel 3.4.3	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
Tabel 3.4.4	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah	50
Tabel 3.4.5	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	51
Tabel 3.4.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	52
Tabel 3.4.7	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah	52
Tabel 3.4.8	Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021	55
Tabel 3.2	Realisasi anggaran Bappeda dan Litbang tahun 2021	56
Tabel 3.3	Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2021	57
Tabel 3.4	Rata-rata capaian kinerja dan anggaran rencana jangka panjang menengah Bappeda dan Litbang TA. 2021	60
Tabel 3.5	Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Bappeda dan Litbang untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021	61



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang.....	5
--	---



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU*

**BABI
PENDAHULUAN**

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda dan Litbang
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD

B.1 Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

B.3 Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Penyusunan Program
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial
 2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah



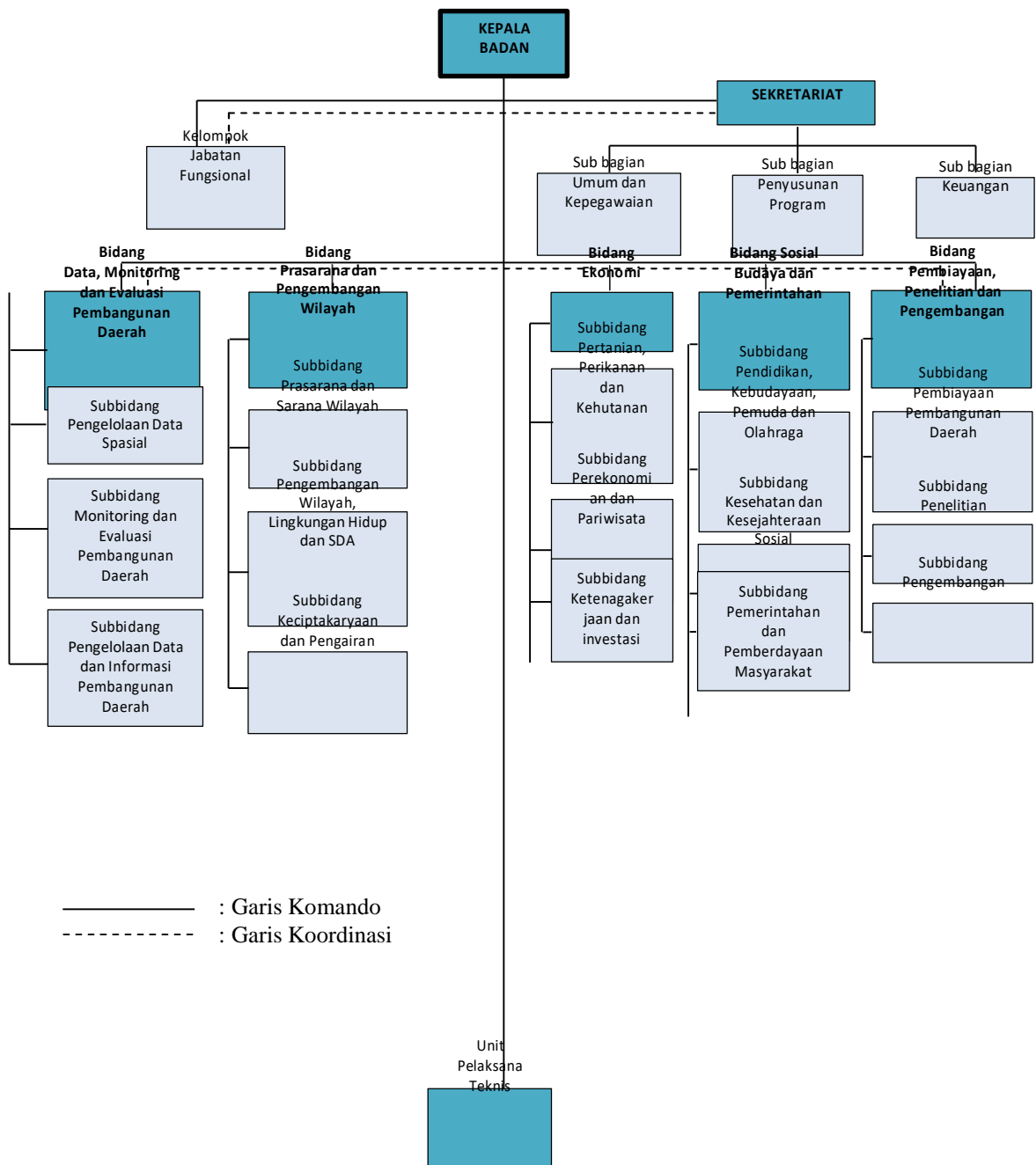
*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU*

2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
3. Subbidang Keciptakarya dan Pengairan
- e. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata
 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
 2. Subbidang Penelitian
 3. Subbidang Pengembangan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
10. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang;
11. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - Kepatuhan OPD untuk memedomani dokumen perencanaan masih rendah
 - Kesadaran OPD terhadap dokumen perencanaan masih rendah
 - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur perencana di OPD
 - Kurang memadainya data-data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - Belum optimalnya sistem informasi perencanaan yang ada
 - Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
 - Aplikasi yang dibangun belum terintegrasi antara satu dengan yang lainnya
3. Belum optimalnya pencapaian hasil evaluasi pembangunan daerah;
 - Hasil evaluasi kinerja belum dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

- Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan)
- OPD belum memahami secara utuh anggaran berbasis kinerja
- Belum digunakannya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian **Misi Keempat** yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021-2026, sehingga misi-misi yang mejadi basis tersebut adalah memantapkan implementasi 5 (lima) program inovasi daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu :

“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN”



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Ajustabel dan Transparan			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 	Belum Primanya Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Sudah adanya koordinasi yang baik di tingkat RT, Desa dan Kecamatan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang RT, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bappeda dan Litbang untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan,



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sarannya, selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda dan Litbang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase capaian program dalam RKPD tahun berkenaan	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbang	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	90%	95%	100%
				Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	90%	95%	100%

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran renstra Bappeda dan Litbang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
3. Meningkatkan kualitas inovasi daerah
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda dan Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Bappeda dan Litbang.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
Misi	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD	
			Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan	
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan	
	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan		Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan inovasi daerah
			Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda dan Litbang mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 3 (tiga) indikator.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022**

**Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA DAN LITBANG
TAHUN 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKP yang selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKP yang selaras}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100\%$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
		Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKP	$\frac{\text{Jumlah sasaran RPJMD yang selaras}}{\text{Jumlah sasaran RKP}} \times 100\%$	Bidang Sosbud, Bidang Ekonomi, Bidang PPW, Bidang Litbang, Bidang Datad dan Informasi	Bappeda dan Litbang
			Persentase program dan kegiatan RKP yang diakomodir program dan kegiatan APBD	$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan RKP}}{\text{Jumlah program dan kegiatan APBD}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Data dan Informasi	Bappeda dan Litbang
		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Yang Dimanfaatkan}} \times 100\%$	Bidang Litbang	Bappeda dan Litbang
			Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	$\frac{\text{Jumlah Inovasi}}{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi}} \times 100\%$	Bidang Litbang	Bappeda dan Litbang

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	100 %
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100 %
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	
3	Meningkatkan pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.749.707.697	APBD
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.183.172.680	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.864.142.208	APBD
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 107.885.300	APBD
5	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 299.824.590	APBD
JUMLAH		Rp. 14.204.732.475	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, realisasi sasaran strategis tahun 2021, pengukuran kinerja tahun 2021, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja pada Bappeda dan Litbang Malinau berpedoman pada Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Karakteristik indikator kinerja Bappeda dan Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja lebih dari 100% = sangat baik
- b. Capaian kinerja 75% sampai dengan 100% = baik
- c. Capaian kinerja 55% sampai dengan 74% = cukup
- d. Capaian kinerja kurang dari 55% = kurang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Hingga akhir tahun 2021, Bappeda dan Litbang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2021					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	100	80,24	80,24
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100	100	100
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	100	285,77	285,77
3	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	100	88,37	88,37
4	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di dukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	0	0
		Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	100	100	100

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target kinerja yang belum bisa mencapai 100% masih diperlukan upaya pencapaian kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	98,13	95	73,65	73,53	100	80,24	80,24

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dalam pengambilan kebijakan, diperlukan data-data perencanaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan agar kebijakan yang diambil sesuai untuk dapat menjawab permasalahan utama Kabupaten. Bappeda dan Litbang mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan data-data perencanaan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Data-data/dokumen perencanaan yang menjadi target capaian dan harus ada di Bappeda dan Litbang adalah:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
4. Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Pada umumnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan. Setiap OPD wajib menyusun dokumen perencanaan yaitu Renstra dan Renja, dokumen ini



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

merupakan acuan bagi OPD untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan, baik itu dalam bentuk usulan lintas sektoral bidang ekonomi, bidang prasarana dan pengembangan wilayah, bidang sosial, budaya dan pemerintahan.

Namun demikian dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja OPD di Kabupaten Malinau harus sesuai dengan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap Renstra dan Renja PD yang disusun agar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra dan Renja PD sesuai dengan RPJMD dan RKPD.

Sasaran strategis pertama, dengan indikator kinerja yaitu **Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD**. Untuk mendukung indikator tersebut diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk perangkat daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dapat terlaksana melalui kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada Bappeda dan Litbang, adapun kegiatan tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan konsultasi publik
2. Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
4. Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator diperoleh dengan cara membandingkan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD, berikut adalah data program dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.1.2

Program dalam RKPD 2021 yang selaras dengan Program RPJMD 2016-2021

No	SKPD	Jumlah Program RKPD	Jumlah Program RPJMD
1	Dinas Pendidikan	8	10
2	Dinas Kesehatan	22	25
3	RSUD	6	11
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	22	28
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	10
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6	6
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	7
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	8	9
9	Dinas Ketahanan Pangan	4	4
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	8
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7
13	Dinas Perhubungan	6	8
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	7
16	Dinas Ketenagakerjaan	4	3
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6	7
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	6
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	7
20	Dinas Perikanan	5	6
21	Dinas Pertanian	9	17
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	13
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3	3
24	Bagian Administrasi Pembangunan	3	5
25	Bagian Ekonomi	2	3
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	4
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	2
28	Bagian Umum	2	2
29	Bagian Hukum	4	4
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	5
31	Bagian Organisasi	4	6
32	Bagian Tata Pemerintahan	2	6
33	Bagian Perencanaan Keuangan	3	
34	Sekretariat DPRD	5	6
35	Sekretariat Korpri	2	2
36	Kecamatan Malinau Kota	3	4
37	Kecamatan Malinau Utara	2	3
38	Kecamatan Malinau Barat	3	3
39	Kecamatan Mentarang	2	3
40	Kecamatan Mentarang Hulu	3	3
41	Kecamatan Pujungan	2	2
42	Kecamatan Kayan Hilir	2	3
43	Kecamatan Kayan Hulu	2	2
44	Kecamatan Sungai Boh	2	2
45	Kecamatan Bahau Hulu	2	2
46	Kecamatan Kayan Selatan	2	2
47	Kecamatan Sungai Tubu	2	3
48	Kecamatan Malinau Selatan	3	3
49	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	2	4
50	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	3	3
51	Perwakilan Kecamatan Long Sule	2	3
52	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	2	2
53	Inspektorat	3	5
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8	12
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	5



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	8
Total		268	334

Sumber Data : RPJMD Perubahan Kab. Malinau Tahun 2021-2026 dan RKPD Kab. Malinau Tahun 2021

Dari tabel diperoleh jumlah program RKPD sebanyak 268 program yang selaras dengan program RPJMD sebanyak 334, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui “**Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD**” sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD yang selaras}}{\text{Jumlah Program RPJMD}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{268}{334} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 80,24$$

Persentase realisasi diperoleh 80,24%, maka persentase capaian kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{80,24}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 80,24$$

Persentase capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 80,24% dengan kategori **Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dokumen RKPD Tahun 2021 dan dokumen RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	80,24	71,56	88,32	73,65	12,13	-9,15	8,95

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Panjang Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	80,24	85	90	95	84,19	98,13	77,53

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Peran Kepala Bappeda dan Litbang sebagai pemangku sasaran strategis OPD memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda dan Litbang yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

2. Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik, forum SKPD dan musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang sangat mendukung dalam proses penyusunan dokumen RKPD
3. Adanya keterlibatan jasa tenaga ahli dalam penyusunan dokumen RKPD dan RPJMD sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat tersedia dan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan renja SKPD
4. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara SKPD dan Bappeda dan Litbang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
5. Ketersediaan anggaran pada Bappeda dan Litbang mendukung penyusunan dokumen RKPD setiap tahun anggaran

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan sangat mempengaruhi usulan program perangkat daerah karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada
2. Perubahan peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat tentang tata cara penyusunan rencana kerja sehingga ada perbedaan nomenklatur program
3. Keterbatasan APBD Kabupaten Malinau menyebabkan tidak semua program dalam RPJMD terakomodir sehingga disesuaikan dengan program prioritas yang mendukung target capaian kinerja pada masing-masing OPD.

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Meningkatkan dan mempertahankan koordinasi dengan para pihak dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan
2. Menyesuaikan target indikator sasaran dengan tujuan agar persentase capaian kinerja dapat tercapai



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

3. Menyusun program sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2020 agar program dalam RKPD 2022 sesuai dengan RPJMD 2021-2026
4. Melakukan koordinasi dengan pihak akademisi sebagai tenaga ahli dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Bappeda dan Litbang

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	80,24%	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	88,22%
			1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja pelaksanaan program adalah **80,24%**.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Untuk mendukung capaian indikator kinerja dilaksanakan dengan
1 (Satu) program yaitu :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pagu anggaran dari 1 program diatas adalah **Rp 1.617.479.285**
dan terealisasi sebesar **Rp 1.426.866.915 (88,22%)** sehingga terdapat
efisiensi anggaran **11.78%**



SASARAN STRATEGIS 2

**MENINGKATNYA KONSISTENSI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Tabel 3.2.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	27,48	95	100	105,26	100	100	100
Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	%	100	95	90,00	94,74	100	285,77	285,77

Dalam proses pembangunan, setiap Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta prasarana dan pengembangan wilayah di Kabupaten Malinau, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai ketingkat Kabupaten/Kota, data dan indikator yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah serta capaian kinerja Bappeda dan Litbang melalui pencapaian indikator kinerja, karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah.

Sasaran Strategis kedua, dengan dua indikator kinerja yaitu **Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD dan Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD** untuk mencapai tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Bappeda dan Litbang dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian melalui asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan OPD oleh bidang-bidang perencana Bappeda dan Litbang. Adapun dokumen perencanaan yang diasistensi dan verifikasi yaitu dokumen Renstra, Renja dan RKA OPD.

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator pertama diperoleh melalui menghitung jumlah sasaran yang ada pada dokumen RPJMD dan sasaran dokumen RKPD, berikut adalah jumlah data sasaran dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator pertama.

Tabel 3.2.2
Persentase Sasaran RPJMD yang Selaras dengan Sasaran RKPD

Jumlah Sasaran RPJMD 2016-2021	Sasaran RKPD 2021
Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatnya mutu pendidikan
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Menurunnya kemiskinan di perdesaan
Meningkatnya Partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Meningkatnya Partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
Meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun perdesaan
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan
Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi
Terbukanya lapangan pekerjaan	Terbukanya lapangan pekerjaan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022**

Mengembangkan produk unggulan	Mengembangkan produk unggulan
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA
Meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan kualitas air dan udara
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya Kesetaraan gender	Meningkatnya Kesetaraan gender
Meningkatnya Pemberdayaan gender	Meningkatnya Pemberdayaan gender
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah
Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Jumlah 23 Sasaran	Jumlah 23 sasaran

Sumber Data : Dokumen RPJMD 2016—2021 dan Dokumen RKPD 2021 Bappeda dan Litbang

Dari tabel diperoleh jumlah sasaran RPJMD sebanyak 23 sasaran dan sasaran RKPD sebanyak 23 sasaran, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui **“Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD”** sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah sasaran RPJMD yang selaras}}{\text{Jumlah sasaran RKPD}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{23}{23} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 100$$

Persentase realisasi indikator pertama diperoleh 100%, maka persentase capaian kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{100}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 100$$

Persentase capaian kinerja indikator pertama berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 100% dengan kategori **Sangat**



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Baik. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dokumen RKPD Tahun 2021 dan dokumen RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	100	24,73	24,73	100	304,37	304,37	0,00

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	100	85	90	95	449,28	449,28	105,26

Untuk capaian kinerja indikator sasaran kedua diperoleh melalui data jumlah program dan kegiatan RKPD dan jumlah program dan kegiatan APBD, berikut adalah data sasaran dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator sasaran kedua.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Tabel 3.2.5
Persentase program dan kegiatan RKPД yang diakomodir program dan kegiatan APBD 2021

No	Program RKPД	Kegiatan RKPД	Program APBD	Kegiatan APBD
1	3	4	5	6
1	268	1278	175	366
Jumlah	268	1278	175	366

Sumber Data : Dokumen RKPД 2021 dan Data Evaluasi Renja PD 2021

Dari tabel diperoleh jumlah program RKPД 2021 sebanyak 268 dan jumlah kegiatan RKPД 2021 sebanyak 1278, sedangkan program APBD 2021 sebanyak 175 dan kegiatan APBD sebanyak 366, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui “**Persentase program dan kegiatan RKPД yang diakomodir program dan kegiatan APBD**” sebagai berikut :

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Program dan kegiatan RKPД}}{\text{Jumlah Program dan Kegiatan APBD}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{(268+1278)}{(175+366)} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 285.77$$

Persentase realisasi indikator kedua diperoleh 285,77%, maka persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{285,77}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 285.77$$

Persentase capaian kinerja indikator kedua berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 285.77% dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator sasaran ketiga ini adalah dokumen RKPД Tahun 2021 dan data Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dan kegiatan RKPDP yang diakomodir program dan kegiatan APBD	%	285,77	70,00	80,00	90,00	308,24	257,21	217,52

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.7
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dan kegiatan RKPDP yang diakomodir program dan kegiatan APBD	%	285,77	85	90	95	82,35	88,89	94,74

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 dan RKPDP 2021 yang update
2. Konsistensi terhadap RKPDP 2021 sebagai pedoman penyusunan rencana kerja 2021 menyebabkan program dan kegiatan yang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

diakomodir pada APBD tidak lebih dari program dan kegiatan yang ada pada dokumen RKPD 2021

3. Ketersediaan aplikasi SIPD oleh Kemendagri sebagai faktor pendukung capaian karena proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terlaksana dengan baik melalui kegiatan asistensi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah
5. Ketersediaan anggaran pada Bappeda dan Litbang sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis kedua dengan melaksanakan asistensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang di Bappeda dan Litbang
6. Komitmen keterlibatan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi terkait capaian kinerja setiap tahunnya

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Keterbatasan anggaran pada OPD yang disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan masalah pandemi covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan pada RKPD 2021 tidak semua dapat dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan APBD Kabupaten Malinau
2. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran tidak dapat dijadikan sebagai data jumlah kegiatan yang diakomodir dan dilaksanakan pada APBD Kabupaten Malinau TA. 2021 sehingga berpengaruh kepada target capaian kinerja tahun 2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.8
Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100%	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.33%
	Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	285.77%	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Kegiatan Koordinasi	



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

			Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja pertama dan kedua didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja pelaksanaan program adalah **100%** dan **285,77%**.

Untuk mendukung capaian indikator pertama dan kedua dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran dari 1 program diatas adalah **Rp 1.540.969.658** dan terealisasi sebesar **Rp 1.391.944.740 (90,33%)** sehingga terdapat efisiensi anggaran **9,67%**



SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA PENCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN

Tabel 3.3.1
Evaluasi pencapaian sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
<i>m</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase capaian target kinerja SKPD	%	-	95	73,33	77,19	100	88,37	88,37

Kegiatan evaluasi dan pengendalian di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil dari evaluasi dan pengendalian dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dokumen Renja. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas.

Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan.

Sasaran strategis ketiga, dengan indikator kinerja yaitu **Persentase capaian target kinerja SKPD**, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen pembangunan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja masing-masing program OPD. Capaian kinerja perangkat daerah yang dievaluasi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Capaian kinerja SKPD 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah / Program	Realisasi Capaian Kinerja	
		Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	Kec. Sungai Tubu	100,00	ST
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,00	ST
3	Sekretariat DPRD	100,00	ST
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100,00	ST
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	ST
6	Dinas Perikanan	100,00	ST
7	Dinas Tenaga Kerja	100,00	ST
8	Dinas Lingkungan Hidup	100,00	ST
9	Bappeda dan Litbang	100,00	ST
10	Kec. Mentarang	100,00	ST
11	Kec. Malinau Barat	100,00	ST
12	Kec. Kayan Hulu	100,00	ST
13	Kec. Bahau Hulu	100,00	ST
14	Kec. Malinau Selatan	100,00	ST
15	Kec. Pujungan	100,00	ST
16	Kec. Malinau Selatan Hilir	100,00	ST
17	Kec. Malinau Selatan Hulu	100,00	ST
18	Kec. Kayan Hilir	100,00	ST
19	Kec. Malinau Kota	100,00	ST
20	Kec. Malinau Utara	99,79	ST
21	Dinas Perhubungan	99,70	ST
22	Kec. Sungai Boh	99,51	ST
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99,29	ST
24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	99,22	ST
25	Kec. Kayan Selatan	98,61	ST
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah	97,22	ST
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	95,19	ST
28	Dinas Pendidikan	95,63	ST
29	Sekretariat Daerah	95,02	ST
30	Dinas Pertanian	94,71	ST
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	94,44	ST
32	Inspektorat	94,40	ST
33	Dinas Ketahanan Pangan	92,71	ST
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91,67	ST
35	DPU, PR, Perkim	91,60	ST
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91,43	ST
37	DP3AS	91,41	ST
38	Kec. Mentarang Hulu	90,00	ST
39	Diskominfo	88,55	T
40	DPMPPTSP	81,91	T
41	Dinkes, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	81,36	T



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

	Berencana		
42	Disbudpar	74,31	T
43	BKPP	71,28	T

Sumber Data : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV, Bidang Data dan Informasi, Bappeda dan Litbang 2021

Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi laporan evaluasi renja triwulan IV sebanyak 43 OPD terhadap capaian kinerjanya dan diperoleh 38 OPD yang mendapat predikat kinerja sangat tinggi (ST) sehingga dalam penghitungan "**Persentase capaian target kinerja SKPD**" digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{38}{43} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 88,37$$

Persentase realisasi evaluasi kinerja dari 38 OPD yang mencapai predikat kinerja sangat tinggi diperoleh 88,37%, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{88,37}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 88,37$$

Persentase tingkat capaian kinerja pada sasaran ketiga yaitu 88,37% dengan kategori **Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian sasaran ketiga ini adalah data evaluasi renja perangkat daerah triwulan IV tahun anggaran 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	88,37	0	0	73,33	0	0	20,51

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	88,37	85	90	95	0	0	77,19

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Ketersediaan laporan evaluasi renja perangkat daerah yang disampaikan setiap triwulan kepada Bappeda dan Litbang
2. Ketersediaan anggaran kegiatan pelaksanaan evaluasi renja perangkat daerah pada bidang data dan informasi di Bappeda dan Litbang
3. Kemampuan SDM perencana perangkat daerah untuk melakukan analisis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan dalam matrik evaluasi renja



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Masih sering terjadi keterlambatan proses pelaporan evaluasi renja perangkat daerah disebabkan oleh keterbatasan sarana jaringan internet pada kecamatan yang ada di daerah perbatasan sehingga harus menunggu transportasi udara untuk menyerahkan data di Kabupaten Malinau
2. Penetapan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan masih ada yang belum sesuai
3. Tingkat kemampuan SDM perencana yang masih kurang memahami cara mengevaluasi dimulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan
4. Refocussing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak maksimal untuk dilaksanakan sehingga ada beberapa OPD yang serapan anggarannya tidak maksimal

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Perlu adanya refreshing dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana OPD yang melaporkan secara rutin kepada Bappeda dan Litbang tentang realisasi kegiatan melalui sosialisasi dan pelatihan
2. Setiap perangkat daerah diharapkan konsisten menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target satuan indikator kinerja
3. Untuk memudahkan evaluasi agar target satuan antara yang ada di Renstra dengan yang ada di Renja selaras
4. Aparatur di masing-masing perangkat daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan, baik internal maupun lintas perangkat daerah, bahkan dengan masyarakat dan dunia usaha



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.5
Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan	Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	88,37	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	74,28
			1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja persentase capaian target kinerja SKPD mencapai angka **88,37%**.

Untuk mendukung capaian **Indikator Sasaran 3** dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pagu anggaran dari program adalah **Rp 393.258.350** dan terealisasi sebesar **Rp 292.125.250 (74,28%)** sehingga terdapat efisiensi anggaran **25,72%**.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS 4

TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DI DUKUNG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Tabel 3.4.1
Evaluasi pencapaian sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
<i>m</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	-	95	0	0	100	0	0
Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	%	100	95	100	105,26	100	100	100

Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan disebabkan karena kualitas penelitian dan pengembangan belum optimal serta kualitas inovasi daerah belum optimal, merupakan permasalahan pembangunan jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Sesuai dengan tugas pokok dari Bidang Litbang adalah melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut ; peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Untuk tercapainya dan menciptakan inovasi perlu adanya kreativitas komitmen yang disertai perubahan pola pikir dan keinginan yang kuat serta konsisten untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan inovasi daerah Bappeda dan Litbang melakukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan beberapa OPD dalam pelaksanaan inovasi daerah, adapun OPD yang menjadi mitra kerja Bappeda dan Litbang dalam hal ini yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Dinas Ketahanan Pangan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
4. Dinas Pendidikan
5. Departemen Agama
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perikanan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peran Bidang Litbang sangat menentukan dari hasil kelitbang berupa dokumen penelitian dan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan dan untuk kepentingan pengembangan masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah khususnya sasaran strategis yang keempat tugas utama dari bidang litbang adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di dukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

Sasaran strategis keempat, dengan dua indikator kinerja yaitu **Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi.**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Capaian kinerja perangkat daerah yang dievaluasi tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Capaian kinerja SKPD 2021

No	Jumlah dokumen kajian penelitian	Jumlah dokumen kajian penelitian yang dimanfaatkan
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

Dari tabel diperoleh jumlah dokumen kajian penelitian sebanyak 0 dan jumlah dokumen kajian penelitian yang dimanfaatkan sebanyak 0, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui "**Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah**" adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah dokumen kajian penelitian}}{\text{Jumlah dokumen kajian penelitian yang dimanfaatkan}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 0$$

Persentase realisasi kinerja dari indikator pertama diperoleh 0%, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{0}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 0$$



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Persentase capaian kinerja indikator pertama berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 0% dengan kategori **Kurang**.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.4
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	0	85	90	95	0	0	0



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Capaian kinerja indikator kedua diperoleh melalui data jumlah inovasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, berikut adalah data jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi pada tahun 2021

Tabel 3.4.5
Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi

No 1	Jumlah Inovasi 2	Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi 3
1	1 (Pelaksanaan Kovergensi Percepatan Pencegahan Stunting) KP2S Kab. Malinau	1 Bappeda dan Litbang
Jumlah	1	1

Sumber Data : Bidang Litbang dan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Dari tabel diperoleh jumlah inovasi pada tahun 2021 sebanyak 1 dan jumlah OPD yang melaksanakan inovasi tahun 2021 sebanyak 1, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui “**Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi**” sebagai berikut :

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah inovasi}}{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi}} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100$$

$$\% \text{ Realisasi} = 100$$

Persentase realisasi indikator kedua diperoleh 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{100}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 100$$

Persentase capaian kinerja indikator kedua berdasarkan skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah 100% dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator sasaran keempat ini adalah dokumen RKPD Tahun 2021 dan data Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	%	100	100	100	100	0	0	0

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.7
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka panjang menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	%	100	85	90	95	117,65	111,11	105,26

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah:

1. Potensi daerah untuk dikembangkan dalam bentuk dokumen penelitian yang sangat banyak sehingga output dari kegiatan penelitian sangat bermanfaat bagi pembangunan di



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Kabupaten/Kecamatan/Desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat

2. Sudah adanya pokok pikiran untuk melaksanakan kegiatan berupa kajian penelitian di Kabupaten Malinau tentang pengembangan potensi daerah yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat tentang pengembangan potensi ikan air tawar pada tahun anggaran 2021
3. Adanya dukungan melalui dokumen rencana kerja dengan program penelitian dan pengembangan daerah
4. Keterlibatan mitra kerja Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan inovasi daerah mencegah stunting

Faktor penghambat capaian kinerja:

1. Anggaran pelaksanaan kegiatan kajian penelitian yang telah disusun pada awal tahun 2021 terkendala dalam realisasi disebabkan karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga mengurangi jumlah anggaran yang sangat banyak pada Bappeda dan Litbang
2. Kegiatan berupa kajian penelitian masih belum dijadikan sebagai prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah pada renstra 2016-2021
3. Tidak tersedianya SDM peneliti pada Bappeda dan Litbang menyebabkan pelaksanaan kajian dan penelitian hanya berharap dari sumber pembiayaan APBD
4. Pembiayaan terhadap pelaksanaan kajian dan penelitian sangat besar biaya yang harus dianggarkan karena melibatkan tenaga ahli dalam bidang penelitian
5. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan keterbatasan pelaksanaan sosialisasi tentang inovasi daerah sehingga jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

melalui aplikasi zoom meeting dimana tidak semua perangkat daerah seperti kecamatan yang berada di daerah perbatasan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Tetap mempertahankan program dan kegiatan tentang pentingnya ketersediaan dokumen dalam bentuk kajian penelitian agar capaian kinerja yang diharapkan dalam pencapaian sasaran strategis OPD dapat tercapai
2. Perlu adanya pedoman sebagai petunjuk agar perangkat daerah dapat membuka wawasan lebih luas tentang inovasi daerah
3. Perlu adanya penghargaan bagi OPD yang dapat memberikan ide dalam pelaksanaan inovasi daerah sehingga memungkinkan muncul ide baru yang dapat dijadikan tema
4. Aparatur di masing-masing perangkat daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan, baik internal maupun lintas perangkat daerah, bahkan dengan masyarakat dan dunia usaha

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

Tabel 3.4.8
Capaian kinerja dan realisasi keuangan tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	0	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	68,81
	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	100	1. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja pertama dan kedua didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2021 capaian kinerja pelaksanaan program adalah **0%** dan **100%**.

Untuk mendukung capaian **Indikator Sasaran 4** dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pagu anggaran dari program adalah **Rp 99.948.190** dan terealisasi sebesar **Rp 68.773.190 (68,81%)** sehingga terdapat efisiensi anggaran **31,19%**.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 APBD-P Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebesar Rp 13.181.714.335 dengan uraian belanja operasi sebesar Rp 13.144.996.335 dan belanja modal sebesar Rp 36.718.000 adapun realisasi belanja operasi Rp 12.506.745.981 (95,14%) dan belanja modal Rp 36.718.000 (100%)

**Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Bappeda dan Litbang Tahun 2021**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	13.144.996.335	12.506.745.981	95,14
2	Belanja Modal	36.718.000	36.718.000	83,65
Total		13.181.714.335	12.543.463.981	95,16

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Kinerja			Program/Kegiatan	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			%	100	100	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 1. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 3. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	9.923.317.202	9.657.947.136	96,76
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase program dalam RKPD yang selaras	%	100	80,24	80,24	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.224.220.935	1.134.741.665	92,69



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

	daerah	dengan RPJMD					1. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan			
3	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	100	100	100	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 1. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.540.969.658	1.391.944.740	91,89
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	%	100	285,77	285,77				
4	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	%	100	88,37	88,37	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1. Kegiatan analisis data dan informasi perencanaan	393.258.350	292.125.250	74,28



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

							<ul style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah 			
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di dukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	0	0	Program penelitian dan pengembangan daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 2. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan 	99.948.190	68.773.190	68,71
		Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	%	100	100	100				



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.4

Rata-rata capaian kinerja dan anggaran rencana jangka panjang menengah Bappeda dan Litbang TA. 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian Kinerja 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	100	80,24	80,24
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100	100	100
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	100	285,77	285,77
3	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	100	88,37	88,37
4	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di dukung penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100	0	0
		Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan inovasi	100	100	100
Rata-rata Pencapaian Kinerja					109,06



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Tabel 3.5
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah bappeda dan litbang
untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Program/Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.923.317.202	9.657.947.136	97,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.533.643.562	9.280.844.789	97,35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.137.000	84.419.000	92,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.427.600	91.317.000	99,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.071.940	98.669.940	99,59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.037.100	102.696.407	95,06
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.617.479.285	1.426.866.915	88,22
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.224.220.935	1.134.741.665	92,69
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	105.727.150	68.793.250	65,07
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	287.531.200	223.332.000	77,67
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.540.969.658	1.391.944.740	90,33
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	713.065.520	628.376.690	88,12
Koordinasi Perencanaan Bidang	444.562.388	442.164.200	99,46



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022*

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	383.341.750	321.403.850	83,84
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	99.948.190	68.773.190	68,81
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0	0
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	99.948.190	68.773.190	68,81
TOTAL	13.181.714.335	12.543.463.981	95,16



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2021 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **109,06%** sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 Bappeda dan Litbang mencapai **95,16%** dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsif harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malinau, 8 Agustus 2022
Kepala Bappeda dan Litbang

Dr. Agustinus, M.AP
NIP. 19670217 199312 1 001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
TAHUN 2021



**LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
TAHUN 2021**



LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
TAHUN 2021



PIAGAM PENGHARGAAN

JUARA 2
Kategori Kolaborasi Lintas Sektor
Kepada

WEMPI W. MAWA, SE (BUPATI MALINAU)

Atas
INOVASI CEGAH STUNTING
dengan judul
AKSI STUNTING
(PEMDA KAB. MALINAU, KALTARA)

dr. Mohamed. Subuh, MPPM
Ketua Umum ADINKES

Dr. drg Widya Leksmawati Habibie Sp.Ort.MM
Direktur Eksekutif HIPPG FIA UI

No. 263/PICS/ADINKES-HIPPG/XI/2021